

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat, yang dimulai pada akhir tahun enam puluhan menuntut kemampuan manajerial atau pemerintah untuk dapat menciptakan suatu sistem perekonomian dan sistem pemerintahan yang baik, guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan nasional tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari sistem yang baik, yang ditetapkan mulai dari pemerintahan yang paling bawah sampai dengan pemerintahan yang ada dipusat.

Seiring dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (OTODA) dimana dalam UU tersebut menganut sistem desentralisasi sehingga Pemerintahan Daerah (PEMDA) mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelolah rumah tangga pemerintahannya sendiri-sendiri dengan berdasarkan pada kemampuan daerahnya. Pada sistem pemerintahan daerah seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan harapan hasil yang maksimal. Upaya tersebut tidak akan lepas dari kebutuhan dana

sebagai salah satu pendorong terwujudnya suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan subsidi dari pemerintah pusat, tetapi tanggungjawab utama untuk Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun, kewenangannya ada pada pemerintah kabupaten atau kota. BOS hanya bantuan saja dari pemerintah pusat terhadap biaya pendidikan kabupaten atau kota setempat, jadi seharusnya pembiayaan pendidikan yang utama berasal dari pemerintah kabupaten atau kota.

Dalam implementasinya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya yaitu membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan, maka perlu menyusun suatu perencanaan pelaksanaan program secara terpadu, terarah, bertahap, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program. Hal ini dimaksudkan agar program yang dilaksanakan benar-benar memiliki nilai manfaat, tepat guna, hasil guna, dan tepat sasaran bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana salah satu Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yaitu BOS.

Dari latar belakang diatas peneliti ingin mengungkapkan lebih jauh tentang pelaksanaan BOS sebagai tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pasuruan dalam membantu PEMDA melaksanakan program pembangunan dibidang pendidikan, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “ Evaluasi Implementasi Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pasuruan “.

B. Perumusan Masalah

Untuk mencapai suatu tujuan, organisasi atau perusahaan selalu dihadapkan pada kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang membuat pencapaian tujuan oganisasi menjadi terhambat. Masalah merupakan suatu kendala yang akan selalu muncul dan harus dihadapi untuk kemudian dicari segala penyelesaiannya. Apabila pemerintah ingin mencapai tujuan dalam pelaksanaan program-program, maka pemerintah harus mengatasi segala masalah yang timbul baik itu masalah intern (pemerintah) maupun extern.

Sebagai permasalahan yang diteliti oleh penulis untuk dicarikan pemecahannya adalah :

1. Apakah anggaran yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pasuruan ?

2. Bagaimanakah implementasi penyaluran dana BOS dalam rangka program sekolah gratis ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi anggaran BOS sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pasuruan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Melatih penulis untuk bersikap dan berfikir terhadap masalah yang akan dihadapi dan berusaha menentukan cara pemecahannya secara ilmiah.
- b. Mengaplikasikan teori tentang pengelolaan anggaran keuangan yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi Pemerintah Setempat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan pikiran bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pasuruan.

3. Bagi Pihak Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan bahan kajian untuk penelitian berikutnya, terutama mahasiswa yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi implementasi anggaran BOS sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pasuruan.

